

KONSEP-DIRI EKS TAHANAN POLITIK

(Studi tentang konsep-diri Eks Tahanan Politik Peristiwa G30S berkaitan dengan adanya Stigma dan Diskriminasi di Kota Surabaya)

SKRIPSI

Fi S 29.105

Hid

k



Oleh :

Riyan Hidayat

NIM: 079916099

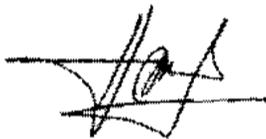
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
SEMESTER GENAP
2005**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Juni 2005

Dosen Pembimbing



Drs. Edy Herry Pryhantoro, Msi

NIP. 132.009.468

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP-DIRI EKS TAHANAN POLITIK

(Studi tentang Konsep-diri Eks Tahanan Politik Peristiwa G30S berkaitan dengan adanya stigma dan deskriminasi di Kota Surabaya)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada:

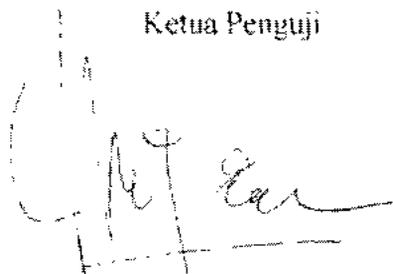
Hari : Selasa

Tanggal: 12 Juli 2005

Pukul : 12.00

Dewan Penguji,

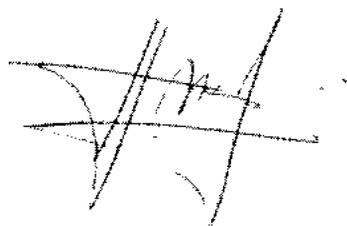
Ketua Penguji



Dr. Musta'in Mashud, Drs, Msi

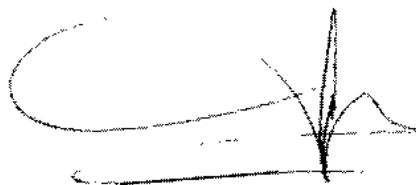
NIP. 131.453.819

Anggota Penguji



Drs. Edy Herry Pryhantoro, Msi

NIP. 132.009.468



Karnaji, Ssos, Msi

NIP. 132.162.037

Abstraksi

Eks Tahanan Politik (eks Tapol) peristiwa G30S merupakan 'produk' dari masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari tahanan atas tuduhan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau pun organisasinya *underbow* nya. Pemerintah Orde Baru menempatkan PKI sebagai *dalang* pada peristiwa pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat pada tahun 1965 (G30S). Oleh karenanya, pada masa itu, para anggota dan simpatisan atau orang yang dituduh anggota PKI ditangkap dan ditahan di beberapa tempat.

Kini para eks Tapol telah menjadi bagian dari masyarakat. Keberadaan mereka diakui secara sosial. Mereka tidak berbeda dengan warga negara lainnya, kecuali terkait dengan identitasnya sebagai eks Tapol. Di sisi lain, pandangan bahwa PKI adalah ateis, kejam, atau pun pengkhianat negara menjadi bagian dari masyarakat. Pandangan tersebut muncul sebagai konsekuensi atas tuduhan Orde Baru terhadap PKI terkait dengan peristiwa G30S. Orde Baru melakukan konstruksi sedemikian rupa sehingga masyarakat mempunyai pandangan negatif tentang G30S dan PKI. Hal ini tentunya menjadi stigma bagi eks Tapol. Meskipun mereka telah menjalani penahanan dan berperilaku sebagaimana layaknya, masyarakat masih melihat dari sudut pandang yang negatif. Sehingga tidak jarang muncul diskriminasi terhadap eks Tapol. Keberadaan stigma dan diskriminasi selanjutnya dapat mempengaruhi konsep-diri dari eks Tapol.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pelebagaan stigma terhadap eks Tapol di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Selanjutnya berupaya untuk mengetahui konsep-diri eks Tapol berkaitan dengan adanya stigma dan diskriminasi. Permasalahan pelebagaan stigma dianalisis menggunakan konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci. Sedangkan untuk mengetahui konsep-diri eks Tapol, teori yang digunakan untuk menganalisisnya adalah teori interaksi simbolik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Penggunaan metodologi ini terkait dengan upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Dari proses penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa proses hegemoni oleh pemerintah Orde Baru, memanfaatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Selain itu, juga menggunakan para intelektual sebagai 'ujung tombak' untuk memelihara keberlangsungan konstruksi tentang G30S dan PKI versi Orde Baru. Akibatnya timbul stigma negatif terhadap eks Tapol. Namun seiring berakhirnya pemerintahan Orde Baru, stigma tersebut juga mulai mengendur. Perubahan pemerintahan memberikan ruang bagi eks Tapol untuk menyuarkan hak-hak mereka.